

## DAMPAK HILIRISASI NIKEL TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT

Si Yusuf Al Hafiz<sup>1</sup>, Nurul Izzah Al Badi'ah<sup>2</sup>

Universitas Gadjah Mada<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga<sup>2</sup>

Email: siyusufalhafiz@gmail.com<sup>1</sup>, nurulizzahalbadiyah@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Hilirisasi nikel merupakan salah satu program strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung perekonomian negara. Sayangnya, program hilirisasi justru membawa dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, penggundulan hutan yang berlebihan, mengganggu kesehatan masyarakat, meningkatkan konflik, menghilangkan sumber penghidupan, bahkan intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara kualitatif, terdapat bukti dari hasil survei bahwa pertambangan nikel memberikan dampak negatif, berbeda dengan tujuan utama yang semula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun malah memperburuk keadaan dan menindas masyarakat. Selain itu, pemerintah dalam hal ini selalu mengabaikan dan terkesan mengabaikan tangisan rakyat, seolah-olah lupa akan tugas yang seharusnya diembannya yaitu membantu rakyat, khususnya rakyat yang sedang berjuang mendapatkan keadilan.

**Kata Kunci:** Hilirisasi, Nikel, Lingkungan

### Abstract

*Nickel downstreaming is one of the national strategic programs which is expected to support the country's economy. Unfortunately, the downstreaming program actually has negative consequences for environmental pollution, excessive deforestation, disturbing public health, increasing conflict, eliminating sources of livelihood, and even intimidation by irresponsible parties. Qualitatively, there is evidence from the survey results that nickel mining has had a negative impact, in contrast to the main aim which was originally to improve people's welfare, but instead makes things worse and oppresses people. Apart from that, the government in this case always ignores and seems to ignore the people's cries, as if they have forgotten the task they should carry out, namely to help the people, especially the people who are struggling to get justice.*

**Keyword:** Downstreaming, Nickel, Environment

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia menyimpan kekayaan mineral yang diperkirakan mencapai \$4 triliun dolar, jika dirupiahkan dengan kurs saat

ini mencapai Rp62.500 triliun.<sup>1</sup> Salah satu pendapatan terbesar negara adalah dari sektor pertambangan. Dengan menggunakan cara ekspor hasil pertambangan akan menghasilkan pendapatan yang cukup. Ada banyak sekali jenis pertambangan di Indonesia dan salah satunya adalah pertambangan nikel. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan 26% cadangan nikel dunia berada di Indonesia dengan jumlah mencapai 72 juta ton nikel.<sup>2</sup>

Nikel merupakan material penting dan merupakan komponen inti dalam pembuatan baterai. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terjadi lonjakan signifikan program transportasi berbahan bakar listrik yang berdampak pada peningkatan permintaan konsumen terhadap nikel, mengingat nikel merupakan bahan utama pembuatan baterai.

Di Indonesia sudah ada larangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2014 yang ditandai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri yang berlaku mulai tahun 2014 hingga tahun 2017. Peraturan ini memuat ketentuan yang mengatur jumlah maksimum dan minimum dalam proses ekspor dan juga harus berupa bahan yang telah diolah di dalam negeri.<sup>3</sup> Selanjutnya pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan aturan larangan ekspor nikel melalui Keputusan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 yang berisi larangan ekspor bijih nikel dengan tujuan ekspor nikel. kandungannya di bawah 1,7% dan peraturan ini berlaku sampai saat ini.<sup>4</sup>

Tujuan larangan ekspor bijih nikel adalah agar bijih nikel yang dihasilkan dari pertambangan di Indonesia dapat diolah secara semi-olah sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk. Di sisi lain, larangan ekspor bijih nikel bertujuan sebagai upaya pengembangan industri hilir. Hilirisasi merupakan proses pengolahan produk dari bahan mentah menjadi produk yang mempunyai nilai lebih tinggi dan siap dijual ke konsumen akhir.<sup>5</sup>

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menjelaskan beberapa aspek yang membahas pengembangan industri, salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Firda Dwi Muliawati, "Harta Karun Tambang RI Tembus Rp62.500 T, Terbesar Dari Batu Bara!," CNBC Indonesia, accessed September 22, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240318111523-4-522807/harta-karun-tambang-ri-tembus-rp62500-t-terbesar-dari-batu-bara>.

<sup>2</sup> Khoiril Anam, "Beneran Kaya, 26% Cadangan Nikel Dunia Berasal dari Indonesia," CNBC Indonesia, accessed September 22, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713094715-4-453887/beneran-kaya-26-cadangan-nikel-dunia-berasal-dari-indonesia>.

<sup>3</sup> "Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional – LAN RI," July 26, 2022, <https://lan.go.id/?p=10221>.

<sup>4</sup> Sarafina Fadillah and Krismanti Tri Wahyuni, "Kajian Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia (Study of Indonesia Nickel Ore Export Ban Policy)," *Seminar Nasional Official Statistics 2023*, n.d.,

<sup>5</sup> "Hilirisasi: Definisi Dan Manfaatnya (2024)," March 15, 2024, <https://palmoilina.asia/sawit-hub/apa-itu-hilirisasi/>.

hilirisasi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan salah satu kunci proses peningkatan perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan peningkatan pendapatan negara yang signifikan mencapai 475 triliun dari tahun 2015-2023.<sup>6</sup> Pemerintah mengklaim bahwa industri pertambangan di Indonesia meningkat dengan adanya program hilirisasi.<sup>7</sup> Namun hal ini harus dilakukan dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari segi ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan pendapatan pemerintah meningkat pesat, namun disisi lain kita juga harus memperhatikan bahwa di balik keberhasilan tersebut banyak pihak yang terkena dampaknya dan lingkungan hidup. akibatnya tercemar. PT Indonesia Nickel Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlokasi di Halmahera, Provinsi Maluku Utara, merupakan industri nikel terbesar kedua di Indonesia. Dalam proses pembangunan dan pengoperasiannya, IWIP telah meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat terkait dengan penggundulan hutan, pencemaran lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>8</sup> Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak kolektif setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dengan harapan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Melihat fenomena yang terjadi akibat program hilirisasi yang digalakkan oleh pemerintah dan swasta sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM perlu ditonjolkan dan ditindaklanjuti lebih dalam. Seringkali pemerintah dan korporasi berperan aktif dalam mengeksploitasi masyarakat dan pencemaran lingkungan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Sehubungan dengan penjelasan di atas, penelitian ini bermaksud mengungkap beberapa kejadian yang tidak tampak ke permukaan terkait dampak program hilir terhadap lingkungan dan masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Mengutip dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan peraturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum.<sup>9</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan website yang relevan dengan tema penelitian ini. Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari website dan jurnal ilmiah untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis dilakukan

---

<sup>6</sup> Raden Muhammad Ikhsan Al-Farraby, "Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional," Presiden RI, September 19, 2024, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-ekonomi-nasional/>.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Ghita Intan, "Hilirisasi Nikel, Siapa yang Untung dan Siapa yang 'Buntung'?", VOA Indonesia, January 18, 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/hilirisasi-nikel-siapa-yang-untung-dan-siapa-yang-buntung-/7445312.html>.

<sup>9</sup> Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

dengan cara mencari data yang relevan dan terkini, kemudian menganalisis dan menyusun data tersebut sehingga dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Downstreaming or what can also be called downstreaming is the stage of processing a product from raw materials into semi-finished materials that are ready to be marketed.<sup>10</sup> Hilirisasi memberikan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya perekonomian negara. Keuntungan dari program hilir jauh lebih besar dibandingkan menggunakan program reguler. Namun perlu digarisbawahi bahwa dampak positif dari program ini hanya berdampak pada perekonomian, bukan terhadap lingkungan dan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan sangat signifikan dan berkelanjutan. Dalam membahas dampak yang timbul dari hilirisasi nikel, penelitian ini hanya membahas dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### 1. Dampak Lingkungan

Hilirisasi merupakan program yang baik sepanjang mekanisme pengolahan dan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada. Namun pada praktiknya tidak sesuai harapan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari program hilirisasi tidak sedikit. Merujuk dari berbagai survei yang ada terkait program hilir, membuktikan bahwa hilirisasi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Ekosistem yang ada semakin rusak dan tidak terkendali.

- a. Tingkat kesuburan tanah semakin menurun sehingga berdampak pada masyarakat petani. Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan pertanian sebagai satu-satunya mata pencaharian mereka untuk hidup di darat.
- b. Keanekaragaman hayati semakin terancam akibat pembukaan lahan secara besar-besaran. Penebangan hutan secara sembarangan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak di kemudian hari menyebabkan hilangnya flora dan fauna yang seharusnya ada. Hal ini akan berimplikasi pada punahnya satwa endemik Indonesia yang seharusnya dilindungi dan dirawat dengan baik. Rumah hewan yang sudah lama hidup di dalam hutan akan hilang, hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya serangan hewan liar terhadap manusia akibat hilangnya tempat tinggalnya.
- c. Pencemaran sungai merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Climate Rights International (CRI)<sup>11</sup> menyebutkan betapa sulitnya masyarakat mendapatkan air bersih. Pencemaran air tidak hanya sebatas diam saja, namun

---

<sup>10</sup> "Hilirisasi."

<sup>11</sup> Press Release, "Indonesia: Drop Criminal Charges Against Students Protesting Nickel Impacts," *Climate Rights International* (blog), August 7, 2024, <https://cri.org/indonesia-drop-criminal-charges-against-students-protesting-nickel-impacts/>.

pencemaran ini juga berdampak pada sumber air yang ada di masyarakat.

- d. Salah satu penyebab menurunnya kualitas udara di iklim tersebut adalah pembangunan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel. Penebangan hutan dimana-mana, pembuangan sampah sembarangan tanpa mempedulikan dampaknya. Harapan untuk mengurangi GRK sebesar 29% pada tahun 2030<sup>12</sup> akan menjadi angan-angan yang tak akan pernah terjadi.

Hilirisasi tambang nikel dapat mengancam masyarakat dengan kerusakan lingkungan yang akan terus terjadi. Masyarakat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi dan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada generasi saat ini namun akan terus berdampak pada generasi mendatang. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat tinggi. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pemburu, dan lain-lain akan mengancam kehidupan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang.

## 2. Dampak masyarakat

Hilirisasi dianggap penting karena dapat mempertinggi nilai produk jual dan berdampak pada terbukanya peluang yang semakin luas.<sup>13</sup> Dengan melakukan pengolahan secara mandiri, hilirisasi pengolahan dapat meningkatkan nilai jual suatu produk sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dari biasanya. Hilirisasi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan berpeluang meningkatkan nilai perekonomian daerah dan negara.

Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam program hilirisasi tersebut tidak akan mampu menutupi dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap masyarakat. Banyak hak masyarakat yang hilang karena tindakan yang tidak tepat, baik dari pemerintah maupun swasta. Ancaman dan penindasan yang dirasakan masyarakat tidak akan pernah hilang selama perusahaan masih berdiri dan berkembang. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh CRI<sup>14</sup> menemukan bahwa proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara perampasan tanah. Masyarakat terus mengalami perampasan dan intimidasi selama masyarakat menolak proses perampasan tanahnya. Harga jual ditentukan sewenang-wenang oleh perusahaan dan jika ditemukan adanya indikasi penolakan maka perusahaan tidak segan-segan mengirimkan petugas dari kepolisian atau tentara untuk memaksa masyarakat menyetujui keputusan yang mereka ambil sendiri. Tindakan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang

---

<sup>12</sup> “Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca Melalui Langkah Strategis pada Sektor Kritis Perubahan Iklim - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” accessed September 27, 2024, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3491/upaya-penurunan-gas-rumah-kaca-melalui-langkah-strategis-pada-sektor-kritis-perubahan-iklim>.

<sup>13</sup> “Hilirisasi.”

<sup>14</sup> Release, “Indonesia.”

Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara proses pengadaan tanah yang baik.

Mereka bahkan tidak mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran sampah, penggundulan hutan, dan penjarahan menjadi penyebab utama hilangnya jaminan kehidupan yang baik dan sehat. Pasalnya, masyarakat harus mendapatkan itu semua selama perusahaan dan pemerintah mematuhi aturan dalam UUD 1945 Amandemen ke IV pasal 28H yang berbunyi

*“(1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

Amanat yang tertuang dalam pasal di atas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan yang akan berdampak pada lingkungan, iklim, masyarakat dan masa depan. Sebab kerusakan dan pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidup merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>15</sup> Selama pemerintah konsisten dan patuh terhadap peraturan yang ada, kejadian buruk yang dialami masyarakat tidak boleh terjadi.

#### **D. Penutup**

Beberapa kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di antara dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari program hilir, cenderung lebih banyak dampak negatifnya. Mengingat pelanggaran HAM, penggundulan hutan, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta masih terus terjadi. Belum ada tindak lanjut yang signifikan dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Pembangunan dan perekonomian memang merupakan program yang penting. Namun ada yang lebih penting dari itu, yaitu kehidupan bermasyarakat yang layak tanpa intimidasi dan ancaman. Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam pembangunan suatu negara, tanpa partisipasi masyarakat maka negara tidak akan berjalan. Hak-hak masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan dan pembangunan perekonomian negara.

---

<sup>15</sup> Sodikin Sodikin Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya,” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (June 23, 2021): 106–25, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

### Jurnal

Sabubu, Theo Alif Wahyu. "Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (November 17, 2020): 72–90. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art5>.

Sodikin, Sodikin Sodikin. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (June 23, 2021): 106–25. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

### Website

Al-Farraby, Raden Muhammad Ikhsan. "Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional." Presiden RI, September 19, 2024. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-ekonomi-nasional/>.

Anam, Khoirul. "Beneran Kaya, 26% Cadangan Nikel Dunia Berasal dari Indonesia." CNBC Indonesia. Accessed September 22, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713094715-4-453887/beneran-kaya-26-cadangan-nikel-dunia-berasal-dari-indonesia>.

Fadillah, Sarafina, and Krismanti Tri Wahyuni. "Kajian Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia (Study of Indonesia Nickel Ore Ekspor Ban Policy)." *Seminar Nasional Official Statistics 2023*, n.d. [https://www.google.com/search?q=Kajian+Kebijakan+Larangan+Ekspor+Bijih+Nikel+Indonesia&oq=Kajian+Kebijakan+Larangan+Ekspor+Bijih+Nikel+Indonesia&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzg4NmowajmoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/1740/532/](https://www.google.com/search?q=Kajian+Kebijakan+Larangan+Ekspor+Bijih+Nikel+Indonesia&oq=Kajian+Kebijakan+Larangan+Ekspor+Bijih+Nikel+Indonesia&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzg4NmowajmoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/1740/532/).

"Hilirisasi: Definisi Dan Manfaatnya (2024)," March 15, 2024. <https://palmoilina.asia/sawit-hub/apa-itu-hilirisasi/>.

Intan, Ghita. "Hilirisasi Nikel, Siapa yang Untung dan Siapa yang 'Buntung'?" VOA Indonesia, January 18, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/hilirisasi-nikel-siapa-yang-untung-dan-siapa-yang-buntung-/7445312.html>.

Muliawati, Firda Dwi. "Harta Karun Tambang RI Tembus Rp62.500 T, Terbesar Dari Batu Bara!" CNBC Indonesia. Accessed September 22, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240318111523-4-522807/harta-karun-tambang-ri-tembus-rp62500-t-terbesar-dari-batu-bara>.

“Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional – LAN RI,” July 26, 2022. <https://lan.go.id/?p=10221>.

Release, Press. “Indonesia: Drop Criminal Charges Against Students Protesting Nickel Impacts.” *Climate Rights International* (blog), August 7, 2024. <https://cri.org/indonesia-drop-criminal-charges-against-students-protesting-nickel-impacts/>.

### **Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain\_\_\_\_\_, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

\_\_\_\_\_, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

\_\_\_\_\_, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum